

FORMULIR DATA CALON PEMILIK/PEMEGANG POLIS ENTITAS DAN PERNYATAAN KEWAJIBAN PAJAK LUAR NEGERI

Mohon membaca instruksi berikut ini sebelum melengkapi formulir ini.

- Lembaga Jasa Keuangan berkewajiban untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan dari Pemegang Rekening Keuangan beserta Pengendali dari Pemegang Rekening Keuangan berbentuk Entitas.
- Sebagai Lembaga Jasa Keuangan, PT Sun Life Financial Indonesia tidak diperbolehkan untuk memberikan saran terkait perpajakan dan/atau hukum. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait penentuan status Domisili Wajib Pajak Anda, mohon hubungi konsultan pajak Anda atau kantor pajak setempat.

Bagian I – Identifikasi Pemegang Rekening Keuangan Entitas (wajib diisi)

Definisi Pemegang Rekening Keuangan adalah Entitas atau Badan yang merupakan Calon Pemilik/Pemegang Polis atau Pemberi Kerja

Nama Entitas	:	
Negara Domisili	:	
Alamat terdaftar/alamat tetap	:	
Alamat terkini dinegara domisili jika berbeda dengan alamat terdaftar/alamat tetap	:	
Kode Pos	:	
Tanggal Pendirian	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)* Entitas	:	
Anggaran Dasar No*	:	
Penanggung Jawab	:	
Nomor Induk Berusaha*	:	
Surat Izin Usaha dari instansi berwenang*	:	

Jenis Entitas

Mohon dipilih salah satu dari kategori yang sesuai:

ENTITAS KEUANGAN	ENTITAS NON-KEUANGAN
Bila Entitas merupakan Lembaga Jasa Keuangan, harap dipilih status Entitas dari salah satu opsi di bawah ini ☐ 1. Institusi Keuangan - selain Entitas Investasi yang Dikelola Secara Profesional, wajib pajak dalam Wilayah Hukum yang Tidak Berpartisipasi dalam Common Reporting Standard (CRS) Penjelasan Contoh Insituti Keuangan - selain Entitas Investasi : Lembaga Simpanan, Lembaga Kustodian atau Perusahaan Asuransi Tertentu ☐ 2. Entitas Investasi yang Dikelola Secara Profesional, wajib pajak dalam Wilayah Hukum yang Tidak Berpartisipasi CRS Penjelasan Entitas Investasi yang berlokasi dalam Yurisdiksi Non-Partisipasi dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain. ☐ 3. Entitas Investasi lainnya Penjelasan Selain dari 1 dan 2	Bila Entitas bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan (yakni Entitas Non-Lembaga Keuangan/NFE), harap pilih status Entitas dari salah satu opsi di bawah ini 1. Entitas Non-Keuangan Aktif** ☐ a). Entitas Non-Keuangan Aktif - perusahaan saham yang secara teratur diperdagangkan pada satu atau lebih pasar sekuritas ☐ b). Entitas Non-Keuangan Aktif - Badan Pemerintah, Bank Sentral atau Organisasi Internasional ☐ c). Entitas Non-Keuangan Aktif - lainnya, mohon jelaskan _____ _____ ** Entitas yang (i) kurang dari 50 persen dari pendapatan bruto yang diperoleh untuk tahun kalender berjalan adalah pendapatan pasif (contohnya: dividen, bunga, pendapat ekuivalen dengan bunga, sewa dan royalty, anuitas); dan (ii) kurang dari 50 persen dari rata-rata berat persentase aset yang dimiliki oleh badan yang merupakan aset yang menghasilkan atau dikuasai untuk mendapatkan pendapatan pasif. ☐ 2. Entitas Non Keuangan Pasif*** *** Entitas yang tidak termasuk dalam Entitas Non-Keuangan Aktif sebagaimana pada nomor 1

Bagian II – Deklarasi Kewajiban Pajak Pemegang Rekening Keuangan Entitas (wajib diisi)

Apakah Calon Pemegang Rekening Entitas memiliki kewajiban pajak selain di Indonesia?

- ☐ Ya. (Wajib melengkapi tabel dibawah ini yang mengindikasikan (i) tempat di mana Pemegang Rekening Entitas adalah wajib pajak dan (ii) Tax Identification Number (TIN) Pemegang Rekening Entitas untuk masing-masing negara yang diindikasikan, serta wajib melanjutkan ke bagian III)
- ☐ Tidak. (Wajib melanjutkan ke bagian III)

Negara Domisili*****	TIN	Alasan tidak memiliki TIN (A/B/C)****	Penjelasan apabila memilih C

**** Penjelasan alasan apabila TIN tidak tersedia

***** Apabila negara domisili diisi Amerika Serikat, maka calon pemegang rekening entitas wajib mengisi formulir ini dan juga formulir FATCA

Kode Alasan	Penjelasan
A	Negara yang bersangkutan tidak menerbitkan TIN
B	Negara yang bersangkutan tidak mewajibkan TIN untuk keperluan CRS
C	Calon Pemegang Rekening Entitas tidak bisa mendapatkan TIN (mohon jelaskan alasannya pada tabel di atas)

Bagian III – Identitas Seluruh Pengurus/Direktur/Mitra/dst (wajib diisi):**Nama Direktur/Pengurus 1 (Nama sesuai dokumen identitas) :**

Tempat Tanggal Lahir :

Negara Tempat Lahir :

Alamat Tinggal Saat ini :

Alamat Surat Menyurat :

NPWP :

Pekerjaan/Jabatan :

Nama Direktur/Pengurus 2 (Nama sesuai dokumen identitas) :

Tempat Tanggal Lahir :

Negara Tempat Lahir :

Alamat Tinggal Saat ini :

Alamat Surat Menyurat :

NPWP :

Pekerjaan/Jabatan :

Nama Direktur/Pengurus 3 (Nama sesuai dokumen identitas) :

Tempat Tanggal Lahir :

Negara Tempat Lahir :

Alamat Tinggal Saat ini :

Alamat Surat Menyurat :

NPWP :

Pekerjaan/Jabatan :

Bagian IV – Informasi Pihak Pengendali (Wajib diisi):

- Definisi Pihak Pengendali adalah Individu yang merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang menjalankan pengendalian atas suatu badan atau memiliki 25% saham atau lebih.
- Definisi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan polis Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada Perusahaan (*ultimately own account*), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Penetapan Pemilik Manfaat mengacu pada Bagian VI – Panduan Penetapan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Korporasi.**Nama Pihak Pengendali 1** :
(Nama sesuai dokumen identitas)

Nama alias (jika ada) :

Nomor Kartu Identitas Diri* : ☐ WNI : KTP☐ WNA : No. Paspor☐ Diaspora Indonesia: No. Paspor

No. Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)

Tempat Tanggal Lahir :

Negara Tempat Lahir :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas :

RT : RW : No. Kodepos:

Kota / Kabupaten:

Provinsi : Negara:

Alamat Tempat Tinggal Saat ini :

(diisi jika berbeda dengan alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas)

RT : RW : No. Kodepos:

Kota / Kabupaten:

Provinsi : Negara:

Alamat Surat Menyurat : ☐ Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas☐ Alamat Lain

RT : RW : No.

Kodepos: Kota / Kabupaten:

Provinsi : Negara:

Alamat dan nomor telepon Kantor (jika ada)	: Nama Kantor :
	Alamat Kantor:
	RT : RW : No. Kodepos:
	Kota / Kabupaten:
	Provinsi : Negara:
Status Perkawinan	:
Jenis Kelamin	:
Sumber Dana	:
Penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (<i>net worth</i>)	:
Hubungan dengan calon pemilik/ pemegang polis	:
Tipe pengendali	: ☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan secara kepemilikan ☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan dengan cara lain ☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - Pejabat Manajemen Senior
NPWP	:
Mempunyai domisili pajak selain di Indonesia	: ☐ Ya. (Wajib melengkapi informasi dibawah ini) ☐ Tidak
Negara di mana terdaftar sebagai Wajib Pajak	:
<i>Tax Identification Number</i> (TIN)	:
Alasan tidak memiliki NPWP/TIN (A/B/C)	: ☐ A. Negara yang bersangkutan tidak menerbitkan TIN ☐ B. Negara yang bersangkutan tidak mewajibkan TIN untuk keperluan CRS ☐ C. Pihak Pengendali tidak bisa mendapatkan TIN
Penjelasan apabila memilih C (wajib diisi)	:
Nama Pihak Pengendali 2 (<i>Nama sesuai dokumen identitas</i>)	:
Nama alias (jika ada)	:
Nomor Kartu Identitas Diri*	:
	: ☐ WNI : KTP
	☐ WNA : No. Paspor
	☐ Diaspora Indonesia: No. Paspor
	No. Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)
Tempat Tanggal Lahir	:
Negara Tempat Lahir	:
Kewarganegaraan	:
Pekerjaan	:
Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas	:
	RT : RW : No. Kodepos:
	Kota / Kabupaten:
	Provinsi : Negara:
Alamat Tempat Tinggal Saat ini (diisi jika berbeda dengan alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas)	:
	RT : RW : No. Kodepos:
	Kota / Kabupaten:
	Provinsi : Negara:
Alamat Surat Menyurat	: ☐ Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas ☐ Alamat Lain
	RT : RW : No.
	Kodepos: Kota / Kabupaten:
	Provinsi : Negara:
Alamat dan nomor telepon Kantor (jika ada)	: Nama Kantor :
	Alamat Kantor:
	RT : RW : No. Kodepos:
	Kota / Kabupaten:
	Provinsi : Negara:
Status Perkawinan	:
Jenis Kelamin	:
Sumber Dana	:

Penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (<i>net worth</i>)	:	
Hubungan dengan calon pemilik/pemegang polis	:	
Tipe pengendali	:	☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan secara kepemilikan ☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan dengan cara lain ☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - Pejabat Manajemen Senior
NPWP	:	
Mempunyai domisili pajak selain di Indonesia	:	☐ Ya. (Wajib melengkapi informasi dibawah ini) ☐ Tidak
Negara di mana terdaftar sebagai Wajib Pajak	:	
Tax Identification Number (TIN)	:	
Alasan tidak memiliki NPWP/TIN (A/B/C)	:	☐ A. Negara yang bersangkutan tidak menerbitkan TIN ☐ B. Negara yang bersangkutan tidak mewajibkan TIN untuk keperluan CRS ☐ C. Pihak Pengendali tidak bisa mendapatkan TIN
Penjelasan apabila memilih C (wajib diisi)	:	
Nama Pihak Pengendali 3 (<i>Nama sesuai dokumen identitas</i>)	:	
Nama alias (jika ada)	:	
Nomor Kartu Identitas Diri*	:	
	:	☐ WNI : KTP ☐ WNA : No. Paspor ☐ Diaspora Indonesia: No. Paspor No. Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)
Tempat Tanggal Lahir	:	
Negara Tempat Lahir	:	
Kewarganegaraan	:	
Pekerjaan	:	
Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas	:	RT : RW : No. Kodepos: Kota / Kabupaten: Provinsi : Negara:
Alamat Tempat Tinggal Saat ini (<i>diisi jika berbeda dengan alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas</i>)	:	RT : RW : No. Kodepos: Kota / Kabupaten: Provinsi : Negara:
Alamat Surat Menyurat	:	☐ Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas ☐ Alamat Lain RT : RW : No. Kodepos: Kota / Kabupaten: Provinsi : Negara:
Alamat dan nomor telepon Kantor (jika ada)	:	Nama Kantor : Alamat Kantor: RT : RW : No. Kodepos: Kota / Kabupaten: Provinsi : Negara:
Status Perkawinan	:	
Jenis Kelamin	:	
Sumber Dana	:	
Penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (<i>net worth</i>)	:	
Hubungan dengan calon pemilik/pemegang polis	:	
Tipe pengendali	:	☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan secara kepemilikan ☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan dengan cara lain ☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - Pejabat Manajemen Senior
NPWP	:	

Mempunyai domisili pajak selain di Indonesia	:	☐ Ya. (Wajib melengkapi informasi dibawah ini)
		☐ Tidak
Negara di mana terdaftar sebagai Wajib Pajak	:	
Tax Identification Number (TIN)	:	
Alasan tidak memiliki NPWP/TIN (A/B/C)	:	☐ A. Negara yang bersangkutan tidak menerbitkan TIN ☐ B. Negara yang bersangkutan tidak mewajibkan TIN untuk keperluan CRS ☐ C. Pihak Pengendali tidak bisa mendapatkan TIN
Penjelasan apabila memilih C (wajib diisi)	:	
Nama Pihak Pengendali 4 (Nama sesuai dokumen identitas)	:	
Nama alias (jika ada)	:	
Nomor Kartu Identitas Diri*	:	☐ WNI : KTP ☐ WNA : No. Paspor ☐ Diaspora Indonesia: No. Paspor No. Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)
Tempat Tanggal Lahir	:	
Negara Tempat Lahir	:	
Kewarganegaraan	:	
Pekerjaan	:	
Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas	:	RT : RW : No. Kodepos: Kota / Kabupaten: Provinsi : Negara:
Alamat Tempat Tinggal Saat ini (diisi jika berbeda dengan alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas)	:	RT : RW : No. Kodepos: Kota / Kabupaten: Provinsi : Negara:
Alamat Surat Menyurat	:	☐ Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas ☐ Alamat Lain RT : RW : No. Kodepos: Kota / Kabupaten: Provinsi : Negara:
Alamat dan nomor telepon Kantor (jika ada)	:	Nama Kantor : Alamat Kantor: RT : RW : No. Kodepos: Kota / Kabupaten: Provinsi : Negara:
Status Perkawinan	:	
Jenis Kelamin	:	
Sumber Dana	:	
Penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (net worth)	:	
Hubungan dengan calon pemilik/pemegang polis	:	
Tipe pengendali	:	☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan secara kepemilikan ☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan dengan cara lain ☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - Pejabat Manajemen Senior
NPWP	:	
Mempunyai domisili pajak selain di Indonesia	:	☐ Ya. (Wajib melengkapi informasi dibawah ini) ☐ Tidak
Negara di mana terdaftar sebagai Wajib Pajak	:	
Tax Identification Number (TIN)	:	
Alasan tidak memiliki NPWP/TIN (A/B/C)	:	☐ A. Negara yang bersangkutan tidak menerbitkan TIN ☐ B. Negara yang bersangkutan tidak mewajibkan TIN untuk keperluan CRS ☐ C. Pihak Pengendali tidak bisa mendapatkan TIN
Penjelasan apabila memilih C (wajib diisi)	:	

Nama Pihak Pengendali 5
(Nama sesuai dokumen identitas)

Nama alias (jika ada)

Nomor Kartu Identitas Diri*

☐ WNI : KTP

☐ WNA : No. Paspor

☐ Diaspora Indonesia: No. Paspor

No. Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)

Tempat Tanggal Lahir

Negara Tempat Lahir

Kewarganegaraan

Pekerjaan

Alamat Tempat Tinggal Sesuai
Dokumen Identitas

RT : RW : No. Kodepos:

Kota / Kabupaten:

Provinsi :

Negara:

Alamat Tempat Tinggal Saat ini
(diisi jika berbeda dengan alamat tempat
tinggal sesuai dengan dokumen identitas)

RT : RW : No. Kodepos:

Kota / Kabupaten:

Provinsi :

Negara:

Alamat Surat Menyurat

☐ Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas

☐ Alamat Lain

RT : RW : No.

Kodepos: Kota / Kabupaten:

Provinsi :

Negara:

Alamat dan nomor telepon Kantor
(jika ada)

Nama Kantor :

Alamat Kantor:

RT : RW : No. Kodepos:

Kota / Kabupaten:

Provinsi :

Negara:

Status Perkawinan

Jenis Kelamin

Sumber Dana

Penghasilan rata-rata per tahun
dan/atau nilai harta kekayaan
(*net worth*)

Hubungan dengan calon pemilik/
pemegang polis

Tipe pengendali

☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan secara kepemilikan

☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan dengan cara lain

☐ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - Pejabat Manajemen Senior

NPWP

Mempunyai domisili pajak selain
di Indonesia

☐ Ya. (Wajib melengkapi informasi dibawah ini)

☐ Tidak

Negara di mana terdaftar sebagai
Wajib Pajak

Tax Identification Number (TIN)

Alasan tidak memiliki NPWP/TIN
(A/B/C)

☐ A. Negara yang bersangkutan tidak menerbitkan TIN

☐ B. Negara yang bersangkutan tidak mewajibkan TIN untuk keperluan CRS

☐ C. Pihak Pengendali tidak bisa mendapatkan TIN

Penjelasan apabila memilih C

Bagian V – Deklarasi (wajib diisi)

- Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan dalam Pernyataan ini (termasuk lampirannya) dicakup oleh ketentuan lengkap syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan saya/Pemegang Rekening dengan PT Sun Life Financial Indonesia ("Perusahaan") yang menetapkan bagaimana Perusahaan dapat menggunakan dan berbagi informasi yang diberikan oleh saya kepada Perusahaan.
- Saya mengakui dan sepakat bahwa informasi yang terdapat dalam Pernyataan ini (termasuk lampirannya) dan informasi mengenai Pemegang Rekening dapat dilaporkan kepada otoritas pajak negara di mana rekening ini berada dan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara atau negara-negara lain di mana Pemegang Rekening mungkin menjadi penduduk pajak bila negara-negara tersebut (atau otoritas pajak di negara tersebut) telah mempunyai Perjanjian untuk mempertukarkan informasi rekening keuangan dengan (negara-negara) di mana rekening ini berada.
- Saya/ Pemegang Rekening menyatakan telah mendapatkan persetujuan dari Pengurus dan/atau Pihak Pengendali untuk memberikan data yang tercantum diatas termasuk perubahannya.
- Saya/ Pemegang Rekening mengizinkan Perusahaan untuk memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan atau mengungkapkan, dan/atau menghapus atau memusnahkan seluruh data dan informasi pribadi yang sudah saya/ Pemegang Rekening berikan kepada Perusahaan, afiliasi dan mitra bisnis dan/atau sudah dimiliki Perusahaan, afiliasi dan mitra bisnis mengenai diri saya/ Pemegang Rekening termasuk data Pengurus dan/atau Pihak Pengendali sebagaimana tercantum diatas untuk tujuan investigasi, riset dan analisis pemasaran dan tujuan lainnya.
- Saya/ Pemegang Rekening dapat menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi Saya/ Pemegang Rekening termasuk data Pengurus dan/atau Pihak Pengendali sebagaimana tercantum diatas yang telah diberikan kepada Perusahaan, kecuali untuk kepentingan investigasi terkait pembayaran Manfaat Asuransi dan hal lain sehubungan dengan Polis serta ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam Pernyataan ini, sepengetahuan terbaik dan keyakinan saya, adalah benar dan lengkap. Saya menyanggupi untuk segera memberitahukan Perusahaan mengenai perubahan keadaan yang menyebabkan informasi yang terdapat dalam pernyataan ini menjadi tidak benar dan memberikan kepada Perusahaan pengkinian Pernyataan yang sesuai dalam waktu 30 hari kerja sejak perubahan keadaan tersebut.
- Saya menyatakan bahwa identitas dan sumber dana Pihak Pengendali adalah benar.
- Saya menyatakan bahwa identitas dan informasi Pihak Pengendali sudah diverifikasi dan sudah sesuai dengan daftar Pihak Pengendali yang terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

☐ Harap beri tanda cek di kotak ini untuk mengkonfirmasi bahwa Anda memiliki kapasitas untuk menandatangani untuk entitas yang diidentifikasi dalam formulir ini sehubungan dengan semua rekening yang terkait dengan formulir ini

Nama	
Tanggal (tanggal/bulan/tahun)	

Tanda Tangan

*Lampirkan copy dokumen

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) entitas
- Akta Pendirian dan Anggaran Dasar
- Kartu Identitas Diri Pihak Pengendali
- Nomor Induk Berusaha
- Surat Izin Usaha dari instansi berwenang

(1) Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki saham paling sedikit 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b) Memiliki hak suara paling sedikit 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c) Menerima keuntungan atau laba paling sedikit 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
- d) Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- e) Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f) Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- g) Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

2) Pemilik Manfaat dari Yayasan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a) memiliki kekayaan awal paling sedikit 25% pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b) memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan;
- c) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d) menerima manfaat dari yayasan; dan/atau
- e) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan.

Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

3) Pemilik Manfaat dari Perkumpulan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a) memiliki sumber pendanaan paling sedikit 25% pada perkumpulan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b) menerima hasil kegiatan usaha paling sedikit 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perkumpulan per tahun;
- c) memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus dan pengawas perkumpulan;
- d) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perkumpulan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- e) menerima manfaat dari perkumpulan; dan/atau
- f) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas sumber pendanaan perkumpulan.

Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

4) Pemilik Manfaat dari Koperasi merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a) menerima sisa hasil usaha paling sedikit 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh koperasi per tahun;
- b) memiliki kewenangan baik langsung maupun tidak langsung, dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi;
- c) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan koperasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d) menerima manfaat dari koperasi; dan/atau
- e) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal koperasi.

Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

5) Pemilik Manfaat dari Persekutuan Komanditer merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a) memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan paling sedikit 25% sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan komanditer;
- b) menerima keuntungan atau laba paling sedikit 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun;
- c) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d) menerima manfaat dari persekutuan komanditer; dan/atau
- e) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal dan/atau nilai barang yang disetorkan pada persekutuan komanditer.

Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

6) Pemilik Manfaat dari persekutuan firma merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a) memiliki modal yang disetorkan paling sedikit 25% sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan firma;
- b) menerima keuntungan atau laba paling sedikit 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan firma per tahun;
- c) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan firma tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d) menerima manfaat dari persekutuan firma; dan/atau
- e) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal pada persekutuan firma.

Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

7) Pemilik Manfaat dari bentuk Korporasi lainnya merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a) memiliki modal, baik dalam bentuk uang atau aset lainnya yang bernilai paling sedikit 25% sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian korporasi;
- b) menerima keuntungan atau laba paling sedikit 25% atau laba yang diperoleh korporasi per tahun;
- c) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d) menerima manfaat dari korporasi; dan/atau
- e) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal yang disetorkan pada korporasi.

Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Gambarkan struktur kepemilikan Korporasi

